

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Tinjauan dari beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian saat ini meliputi:

Penelitian yang dilakukan oleh Lina Afriyana dkk (2023)⁶ dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan dan dampak dari pembangunan jalan, air, pendidikan dan pasar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berlaku untuk semua kota dan kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Tahun 2016 hingga 2021. Penelitian ini dilakukan secara kuantitatif menggunakan teknik asosiatif dan deskriptif. Penelitian ini menganalisis pengaruh infrastruktur terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif pada 10 kabupaten atau kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan tahun pengamatan pada tahun 2016-2021. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi yang bersumber dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistika Provinsi NTB, dan satu data NTB. Data dikumpulkan melalui teknik analisis regresi dan panel. Di mana langkah awal di tempuh ada 3 pendekatan yaitu model efek biasa (*Pooled Least Square*) menggunakan metode OLS (*Ordinary Least Square*), model efek tetap dengan menambahkan variabel *dummy* pada data panel, dan model efek tetap dengan

⁶ Afriyana, L., Salmah, E., Sriningsih, S., & Harsono, I., 2023, "Analisis perkembangan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2016-2021", *elastisitas, Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5(1)1, 1-12.

menggunakan eror dari data panel menggunakan GLS (*Generalize Least Square*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur yang di bahas memiliki dengan berbagai efek: infrastruktur jalan, air, pendidikan, listrik serta pasar mempunyai efek paling penting untuk pertumbuhan ekonomi inklusif, sementara infrastruktur pendidikan dan jalan tidak mempunyai efek yang signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Lina Afriyana dkk (2023) dengan penelitian saat ini adalah meneliti tentang pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dengan metode pendekatan deskriptif di mana pendekatan yang dilakukan dengan mendeskripsikan yang ditemukan di lapangan lebih khusus, jelas, dan mendalam. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu tentang infrastruktur ekonomi yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sedangkan penelitian saat ini tentang Infrastruktur jalan ada di Kecamatan Kenjeran, Jawa Timur.

Penelitian yang dilakukan oleh Bunyanun Marsus dkk (2020)⁷ bertujuan untuk melihat bagaimana jalan raya memengaruhi pertumbuhan ekonomi kota palopo. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif, karena metode ini lebih menekankan aspek pengukuran objek dari situasi. Data yang akan digunakan dalam penelitian dikumpulkan melalui dokumentasi tertulis dan elektronik dari lembaga atau institusi. Metode dokumentasi atau studi pustaka tidak memerlukan teknik sampling atau kuesioner.

⁷ Marsus, B., Indriani, N. K., Darmawan, V., & Fisur, A. A., 2020, "Pengaruh panjang infrastruktur jalan terhadap pdrb dan pertumbuhan ekonomi di kota palopo", J. Penbang, Ekon, Dan Keuang, Drh, 1(2016), 1-5.

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan Metode Regresi Linear Sederhana. Berdasarkan penelitian Ferdiansyah Ritonga dan Ivan Aries Setiawan (2011), analisis regresi adalah teknik statistika yang digunakan untuk menyelidiki dan membuat model berdasarkan hubungan antar variabel. Ini digunakan dalam hampir semua bidang ilmu, seperti ekonomi, manajemen, akuntansi, biologi, dan ilmu sosial.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Bunyanun Marsus dkk (2020) dengan penelitian saat ini adalah infrastruktur jalan dengan menggunakan pengumpulan data yang berupa dokumentasi. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada metode dan lokasi penelitian, penelitian terdahulu menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang dilakukan di Kota Palopo, sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dilakukan di Kota Surabaya.

Penelitian yang dilakukan oleh Vina Maria Ompusunggu, S.Sos., MSP (2018)⁸ yang dilakukan di Desa Semangat Gunung Kabupaten Karo dengan tujuan untuk mengidentifikasi bagaimana pengembangan infrastruktur jalan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif. Data yang dikumpulkan melalui wawancara dan daftar pertanyaan dalam bentuk angket, yang digunakan untuk analisis deskriptif.

Dilihat dari masalah saat ini, masyarakat khawatir tentang kerusakan jalan menuju Semangat Gunung karena tidak terawat. Selain itu, jalan ini adalah salah

⁸ Ompusunggu, V. M., 2018, "Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Desa Semangat Gunung, Kabupaten Karo", *Jupeko, Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 3(2).

satunya menuju lokasi wisata air panas alam di kaki Gunung Sibayak, yang menarik wisatawan setiap hari dan menarik biaya. Menurut hasil penelitian, di Desa Semangat Gunung, Kabupaten Karo pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh pembangunan infrastruktur jalan. Salah satu dampak positifnya adalah bahwa sarana transportasi memudahkan orang untuk membeli dan menjual hasil panen mereka, sehingga aktivitas lebih cepat, pembangunan lebih merata di Kabupaten Karo dan sekitarnya, terbuka jalur alternatif ke Berastagi, Kabanjahe, dan Tigapanah, menciptakan lapangan kerja baru, dan mempermudah akses ke tempat wisata pemandian panas.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Vina Maria Ompusunggu, S.Sos., MSP (2018) dengan penelitian saat ini adalah untuk mengetahui pengaruh dan dampak pembangunan infrastruktur jalan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian berada pada pengumpulan data dan tempat penelitian. Penelitian sebelumnya dalam pengumpulan data menggunakan angket dan wawancara yang dilakukan di Desa Semangat Gunung, Kabupaten Karo, sedangkan penelitian saat ini dalam pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan di Kota Surabaya, Kecamatan Kenjeran.

Studi ini dilakukan oleh Lalu Moh. Nazar Fajri, SE., MPA (2017)⁹ dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembangunan infrastruktur jalan terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Jenggala secara keseluruhan. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Berdasarkan

⁹ Nazar Fajri, Lalu Moh., 2017, "Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus di Desa Jenggala Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara)", Jurnal sikap, 1(1), 11-12.

penelitian Nawawi (1990: 64), pendekatan deskriptif merupakan pendekatan penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah yang nyata saat melakukan studi. Selanjutnya, menyampaikan masalah sebagaimana adanya sambil memberikan interpretasi yang akurat dan logis. Penelitian menggunakan data primer dan sekunder yang bersifat kualitatif. Dalam teknik pengumpulan data menggunakan dokumen kuesioner, observasi, wawancara, dari halaman web serta buku. Hasil yang di dapat pada penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Jenggala terlibat dalam pembangunan infrastruktur dan jalan desa dalam tiga tahap yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pemeliharaan. Ada hubungan kuat antara partisipasi masyarakat dalam proses tersebut dan jumlah keluarga sejahtera dan jenis pekerjaan, khususnya pertanian dan nelayan.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Lalu Nazar Fajri, SE., MPA (2017) dengan penelitian saat ini adalah melihat perkembangan infrastruktur jalan yang sedang berlangsung serta melihat partisipasi masyarakat dalam menyikapi infrastruktur jalan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, yang melibatkan wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada lokasi penelitian, penelitian sebelumnya terletak di Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, sedangkan penelitian saat ini berlokasi di Kota Surabaya, Kecamatan Kenjeran, Jawa Timur.

Penelitian yang dilakukan oleh Rr. Lulus Prapti NSS dkk (2015)¹⁰ dengan tujuan untuk menganalisis dampak pembangunan jalan terhadap pertumbuhan pendapatan rakyat, usaha ekonomi, manfaat ekonomi, dan manfaat sosial yang di

¹⁰ Prapti N.S.S., Luluk, dkk, 2015, "Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat Di Kota Semarang", Jurnal Dinamika Sosbud, Vol 17, No. 2.

terima oleh warga di Kota Semarang. Penelitian yang dilakukan menggunakan analisis deskriptif dan SPSS. Berdasarkan penelitian Sugiyono (2017), analisis deskriptif adalah teknik statistika yang digunakan untuk menganalisis data dengan menggambarkan atau mendeskripsikan data yang dikumpulkan. Metode ini tidak bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi atau generalisasi. Sedangkan analisis SPSS merupakan berperan sebagai alat bantu untuk mengelola data penelitian dengan metode statistika deskriptif maupun inferensial (Ghozali, 2018). Penelitian ini menggunakan wawancara dan kuesioner untuk mengumpulkan data. Penelitian ini menemukan efek positif infrastruktur jalan terhadap manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan biaya sosial yang diterima.

Persamaan penelitian saat ini berfokus pada pembangunan infrastruktur jalan untuk meningkatkan perekonomian. Perbedaan pada penelitian ini adalah penggunaan metode penelitian, penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif dan SPSS dan berlokasi di Kota Semarang, sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dan berlokasi di Kota Surabaya.

Studi yang dilakukan oleh Teraik Kogoya dkk (2015)¹¹ dengan tujuan untuk mengetahui seberapa aktif masyarakat dalam membangun infrastruktur jalan desa di Kabupaten Lanny Jaya, Papua. Teknik yang digunakan di dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif. Data yang diambil adalah data primer dengan melakukan wawancara dan observasi. Hasil yang di dapat pada penelitian ini diklasifikasikan menjadi 3 kategori partisipasi masyarakat: tingkat

¹¹ Kogoya, T., Olfie, B., & Laoh, O. E., 2015, "Partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur jalan desa di kabupaten lanny jaya-papua", Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 15(02).

tinggi, tingkat menengah, dan tingkat rendah, berdasarkan perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan, dari aktif hingga tidak aktif.

Persamaan penelitian yang di lakukan oleh Teraik Kogoya dkk (2015) dengan penelitian saat ini adalah pembangunan infrastruktur jalan dengan menggunakan metode deskriptif dengan wawancara dan observasi. Sedangkan perbedaan penelitian berada pada lokasi penelitian, penelitian sebelumnya berada di Kabupaten Lanny Jaya, Papua, sedangkan penelitian saat ini berlokasi di Kecamatan Kenjeran, Jawa Timur.

Tabel 2.1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian

No. 1	Judul	Analisis perkembangan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2016-2021
	Peneliti	Lina Afriyani, Emi Salmah, Siti Sriningsih, dan Iwan Harsono
	Tahun	2023
	Persamaan	Pelaksanaan Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dengan metode pendekatan deskriptif
	Perbedaan	Lokasi penelitian sebelumnya dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sedangkan penelitian saat ini dilakukan di Provinsi Jawa Timur

No. 2	Judul	Pengaruh panjang infrastruktur jalan terhadap pdrb dan pertumbuhan ekonomi di kota palopo
	Peneliti	Bunyanun Marsus, Ni Kadek Indriani, Visal Darmawan, Amiruddin Akbar Fisu
	Tahun	2020
	Persamaan	Infrastruktur jalan dengan menggunakan pengumpulan data yang berupa dokumentasi
	Perbedaan	Penelitian sebelumnya menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang dilakukan di Kota Palopo, sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang dilakukan di Kota Surabaya

No. 3	Judul	Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Desa Semangat Gunung, Kabupaten Karo
	Peneliti	Vina Maria Ompusunggu, S.Sos., MSP
	Tahun	2018
	Persamaan	Mengetahui pengaruh dan dampak pembangunan infrastruktur jalan dengan menggunakan metode deskriptif
	Perbedaan	Penelitian sebelumnya dalam pengumpulan data menggunakan angket dan wawancara yang dilakukan di Desa Semangat Gunung, Kabupaten Karo, sedangkan penelitian saat menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan di Kota Surabaya, Kecamatan Kenjerean

No. 4	Judul	Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus di Desa Jenggala Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara)
	Peneliti	Moh. Nazar Fajri, SE., MPA
	Tahun	2017
	Persamaan	Melihat perkembangan infrastruktur jalan yang sedang berlangsung serta melihat partisipasi masyarakat dalam menyikapi infrastruktur jalan
	Perbedaan	Lokasi penelitian sebelumnya dilakukan di Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok, sedangkan penelitian saat ini dilakukan di Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya

No. 5	Judul	Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat Di Kota Semarang
	Peneliti	Rr. Luluk Prapti NSS, Edi Suryawadana, dan Dian Triyani
	Tahun	2015
	Persamaan	Pembangunan infrastruktur jalan guna meningkatkan perekonomian
	Perbedaan	Metode analisis dan SPSS dan berlaku di Kota Semarang, sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif di Kota Surabaya

No. 6	Judul	Partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur jalan desa di kabupaten lanny jaya-papua
	Peneliti	Teraik Kogoya, Benu Olfie, dan Olly Esry Laoh
	Tahun	2015
	Persamaan	Pembangunan infrastruktur jalan dengan menggunakan metode deskriptif dengan wawancara dan observasi
	Perbedaan	Lokasi penelitian sebelumnya dilakukan di Kabupaten Lanny Jaya-Papua, sedangkan penelitian saat ini dilakukan di Kecamatan Kenjeran-Jawa Timur

Sumber: Data Peneliti, 2025

2.2. Pembangunan

2.2.1. Pengertian Pembangunan

Pada dasarnya, pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan keadaan masyarakat untuk kemajuan menjadi lebih baik. Namun secara umum pembangunan merupakan tahap perubahan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam berbagai elemen, seperti ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Upaya yang terkoordinasi untuk mencapai kemajuan berkelanjutan pada tingkat lokal, nasional, dan global diperlukan dalam proses ini. Berdasarkan penelitian Siagian (2010: 15), pembangunan didefinisikan sebagai tindakan atau kumpulan pertumbuhan yang di rencanakan serta dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah guna mendorong modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).¹²

Menurut Afifuddin (2012: 42-47), ada banyak definisi pembangunan berdasarkan berbagai perspektif. Beberapa di antaranya adalah:

1. Pembangunan adalah transformasi

Perubahan dalam arti mewujudkan suatu kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari yang ada saat ini. Kondisi yang lebih baik ini harus dilihat dari sudut pandang keseluruhan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, sehingga hasilnya tidak hanya meningkatkan taraf hidup seseorang tetapi juga meningkatkan aspek lainnya dari kehidupan. Karena setiap aspek kehidupan memiliki hubungan yang erat satu sama lain.

¹² Simbolon, D. S., Sari, J., Purba, Y. Y., Siregar, N. I., Salsabila, R., & Manulang, Y., 2021, "Peranan pemerintah desa dalam membangun infrastruktur", Jurnal Kewarganegaraan, 5(2), 295-302.

2. Pembangunan adalah kemajuan

Pertumbuhan berarti kemampuan suatu negara untuk terus berkembang secara kualitatif dan kuantitatif. Pertumbuhan mencakup semua aspek kehidupan, sehingga usaha pembangunan melibatkan semua aspek. Karena suatu negara dianggap sebagai suatu organisme secara filsafat, konsep pertumbuhan dianggap tepat dan wajar dalam pembangunan.¹³

2.2.2. Teori Pembangunan

Teori pembangunan yang dikemukakan oleh Rusli (1996) dan Robert Malthus (1766-1834) bisa disebut dengan Teori Pembangunan Malthus. Teori ini menyatakan bahwa, pertambahan jumlah penduduk cenderung lebih cepat dari pertumbuhan pangan jika tidak ada pembatasan. Deret hitung akan mengikuti perkembangan pangan, sedangkan deret ukur akan mengikuti perkembangan penduduk. Malthus lebih Realistis dalam menganalisis pertumbuhan penduduk dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi, menganggap pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup untuk berlangsungnya pembangunan ekonomi. Menurutnya, proses pembangunan adalah suatu proses naik turun aktivitas ekonomi daripada sekedar lancar-tidaknya aktivitas ekonomi.¹⁴

¹³ Djadjuli, D., 2018, "Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah", *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 8-21.

¹⁴ <https://digilib.unila.ac.id/1836/9/BAB%20II.pdf>. Diakses tanggal 11 Februari 2025.

2.2.3. Tujuan Pembangunan

Dalam upaya pembangunan tentu memiliki tujuan dalam pelaksanaannya, tujuan pembangunan mencakup tiga prinsip, yaitu:

1. Terpenuhiya kebutuhan manusia dasar, seperti pakaian, makanan, perlindungan dari ancaman serta kesehatan.
2. Nilai diri sendiri, kemampuan untuk menjadi diri sendiri.
3. Kemampuan untuk memilih sendiri secara bebas.

Dari pendapat ini, dapat disimpulkan bahwa pembangunan dilakukan oleh masyarakat, untuk masyarakat, dan oleh masyarakat. Dengan demikian, peran masyarakat di dalam pembangunan terlihat baik sebagai subjek maupun sebagai obyek.

Dalam proses pembangunan itu sendiri, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuannya, pemerintah harus menyelesaikan tiga pekerjaan, termasuk:

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan ide yang telah direncanakan dan disusun secara berkala oleh kelompok tertentu dalam mencapai tujuan tertentu.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pembangunan begitu penting karena pemerintah dianggap berhasil jika mencapai hasil yang sangat baik dan selesai. Untuk melakukan pembenahan yang sudah direncanakan sebelumnya, masyarakat harus bekerja sama untuk melakukannya.

3. Pengawasan

Pengawasan pada umumnya dikaitkan dengan mencegah anggaran pemerintah menyimpang. Pengawasan adalah kegiatan yang berkaitan dengan penentuan serta evaluasi berbagai tindakan yang telah dilakukan.¹⁵

2.2.4. Pembangunan Perkotaan

Perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan wilayah kota demi memenuhi kebutuhan lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya penduduk dikenal sebagai pembangunan perkotaan. Proses ini melibatkan berbagai bagian seperti infrastruktur, transportasi, perumahan, layanan publik, dan ruang terbuka hijau dengan tujuan utama untuk membuat kota menjadi layak huni, inklusif, berkelanjutan, dan produktif.

2.2.4.1. Teori Pembangunan Perkotaan

Beberapa teori utama pembangunan perkotaan adalah dari berbagai disiplin ilmu, seperti ekonomi, sosiologi, geografi, dan perencanaan kota, dan berfokus pada bagaimana kota-kota berkembang, berfungsi, dan berubah seiring waktu.

Teori pada pembangunan perkotaan yang digunakan sesuai dengan keadaan saat ini adalah Teori *Smart Growth* dan Perkembangan berkelanjutan. Dengan berfokus pada pengurangan jejak karbon, penggunaan lahan yang efisiensi, dan

¹⁵ Akib, K., & Teparo, O. A., 2020, "Peran pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di desa malitu kecamatan poso pesisir selatan kabupaten poso", *Jurnal Ilmiah Administratie*, 8(1), 29-32.

peningkatan kualitas hidup di kota, teori ini menekankan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Smart Growth merupakan teori perencanaan kota dan transportasi yang bertujuan untuk membuat kota lebih mudah diakses dan kompak untuk mencegah *sprawl*.¹⁶ Di Amerika Utara, istilah *smart growth* menjadi lebih populer.¹⁷

Salah satu pendekatan perencanaan kota yang dikenal sebagai Smart Growth berfokus pada penggunaan lahan yang lebih besar, berorientasi pada transportasi, tertarik pada berjalan kaki dan bersepeda, dan berkembang melalui penggunaan gabungan.¹⁸

2.2.4.2. Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Pembangunan berwawasan lingkungan tidak terlepas dari pembangunan perkotaan juga. Untuk mengembangkan area tanpa mengganggu ekosistem sekitarnya. Kantor KLH (1990) menyatakan bahwa keberlanjutan pembangunan berwawasan lingkungan dapat diukur dengan tiga syarat:

- a. Penghematan penggunaan sumber daya alam,
- b. Berkurangnya polusi dan dampak lingkungan lainnya,
- c. Kegiatan harus dapat meningkatkan sumber daya yang dapat digunakan atau diganti.¹⁹

¹⁶ *Sprawl* adalah kata dalam bahasa inggris yang berarti menyebar atau berkembang secara tidak teratur atau tanpa kendali. Dalam konteks perkotaan, *sprawl* disebut juga urban *sprawl* yang berarti perluasan wilayah perkotaan yang tidak terkontrol.

¹⁷ Gosal, C. V., Kindangen, J. I., & Rengkung, M. M., 2019, "Kajian Penggunaan Lahan Mix Uce Di Kota Manado Menuju Smart Growth City, SPASIAL, 6(2), 354-363.

¹⁸ Bhatta Basudeb, 2010, "Analysis of Urban Growt and Sprawl from Remote Sensing Data", United State, Enviromental Protection Agency.

¹⁹ Hapsoro, N. A., & Bangun, K., 2020, "Perkembangan Pembangunan berkelanjutan dilihat dari aspek ekonomi di Indonesia", Lakar, Jurnal Arsitektur, 3(2), 88-96.

2.2.4.3. Urbanisasi

Pada awalnya, kota hanyalah pemukiman atau desa yang tersebar di seluruh wilayah, tetapi karena nilai strategis dan potensinya, desa tersebut perlahan tapi pasti tumbuh menjadi ramai dan membentuk suatu kota atau perkotaan. Di beberapa tempat, pertumbuhan perkotaan yang sangat cepat dan menyebabkan masalah yang ada.

Terdapat 3 komponen utama yang bertanggung jawab atas berbagai masalah yang muncul, yaitu peningkatan jumlah penduduk, peningkatan jumlah aktivitas yang dilakukan, dan peningkatan luasnya area perkotaan yang dibangun.

Dalam hal ini penambahan populasi, ini disebabkan oleh pertambahan alamiah yang disebabkan oleh proses kelahiran dan kematian. Namun, untuk wilayah perkotaan. Penduduk perkotaan meningkat lebih banyak karena migrasi, terutama urbanisasi. Untuk pertama kalinya, lebih dari setengah populasi global tinggal di perkotaan pada tahun 2008. Saat ini, 41% orang Indonesia tinggal di perkotaan. 55% orang di Jawa-Bali tinggal di kota. Tahun 2025, 65% orang Indonesia akan tinggal di 16 kota besar. Tabel 2.2 menunjukkan penjelasan di atas sebagai berikut:

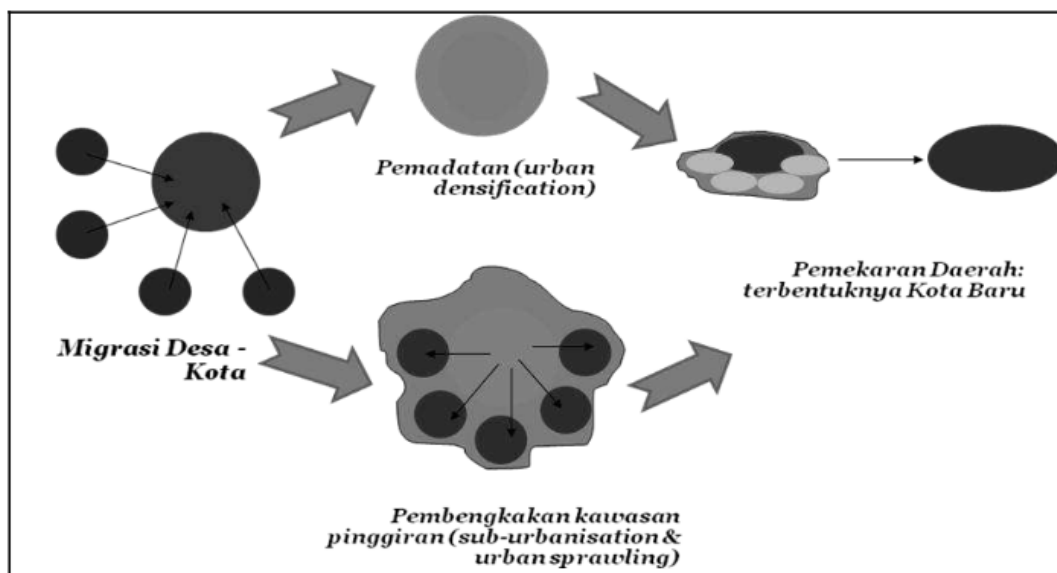
Tabel 2.2 Perbandingan Penduduk Perkotaan dan Pedesaan

Tahun	Perdesaan (% pdd)	Perkotaan (% pdd)
1970	82.6	17.4
1980	77.73	22.27
1990	69.1	30.9
1995	64.09	35.91
2002	56.01	43.99
2005	51.7	48.3
2010	47.97	52.03
2015	43.95	56.05
2020	39.61	60.39
2025	34.95	65.05

Sumber: Bappenas (2005) dan Pustra (2008), diolah dengan asumsi growth 1.5%/thn

Jumlah penduduk yang meningkat, terutama sebagai akibat dari perpindahan dari desa menuju kota, telah mengakibatkan kepadatan penduduk di perkotaan serta pembengkakan dan pembangunan di pinggiran kota. Sering kali, pembagian wilayah menghasilkan suatu kabupaten atau kota baru. Siklus peningkatan populasi akan digambarkan pada Gambar 2.1 berdasarkan penjelasan di atas:

Gambar 2.1 Dampak Peningkatan Populasi Pada Kawasan Perkotaan



Sumber: I Wayan Suweda, 2011

Tabel 2.2 dan Gambar 2.1 menunjukkan bahwa proses urbanisasi, yang memungkinkan orang untuk menetap di wilayah perkotaan untuk mencari pekerjaan atau mendirikan bisnis, menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam jumlah penduduk yang tumbuh.²⁰

Perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke perkotaan, biasanya diiringi dengan perubahan pola hidup, ekonomi, dan sosial masyarakat, dikenal dengan urbanisasi. Proses ini terjadi saat kota berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi, pemerintahan, pendidikan, dan budaya. Berdasarkan Penelitian Ir. Triatno Yudo Harjoko (2010), urbanisasi adalah transformasi penduduk dan kawasan non perkotaan menjadi tuang perkotaan.²¹ Di sini berbicara tentang proses spasial yang membedakan dan mengkhususkan penggunaan ruang, dengan beberapa tempat menerima proporsi pemukiman dan instalasi yang lebih besar daripada yang lain.

Ada dua faktor yang mempengaruhi urbanisasi: pendorong dan penarik. Adanya daya tarik itu membuat seseorang ingin pindah ke perkotaan adalah faktor penarik. Faktor-faktor itu mendorong orang untuk pindah ke kota dengan keadaan pedesaan yang tidak lagi menguntungkan lagi termasuk standar pendidikan yang tinggi, lebih banyak fasilitas rekreasi, lebih banyak kesempatan kerja, lebih banyak keamanan dan harta benda, serta lebih banyak interaksi sosial.²² Namun, faktor-faktor lain termasuk kualitas hidup yang lebih baik. Kekuatan pendorong termasuk standar hidup yang buruk, kurangnya fasilitas keamanan, kurangnya opsi

²⁰ Suweda, I. W., 2011, "Penataan Ruang Perkotaan Yang Berkelanjutan, Berdaya Saing, dan Bero-tonomi, Jurnal Ilmiah Teknik Sipil, 15(2).

²¹ Aini, A. F., 2022, "Analisis Dampak Urbanisasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya. *Journal Economics and Strategy*, 3(2), 60-67.

²² Widiawaty, M. A., 2019, "Faktor-faktor Urbanisasi di Indonesia".

transportasi dan sarana komunikasi, kesempatan kerja, perawatan kesehatan, serta pendidikan yang kurang bagus.²³

Pembangunan sebuah perkotaan sangat dipengaruhi oleh urbanisasi. Mereka memiliki dampak negatif dan positif. Dampak urbanisasi termasuk:

1. Lebih sedikit ruang lahan kosong di kota

Daya dukung kota menjadi sulit karena pertumbuhan penduduk yang begitu pesat. Saat ini, kota hampir tidak memiliki ruang kosong. Tidak ada tempat tinggal, parkir, atau lalu lintas kendaraan yang cukup. Bahkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) tidak tersedia lagi. Tempat kosong di kota telah digunakan secara luas oleh penduduk kota untuk pemukiman, perdagangan, dan aktivitas industri yang legal maupun ilegal. Rumah pendatang biasanya dibangun untuk tujuan bisnis dan perdagangan. Selain itu, orang-orang yang tinggal di kota yang tidak memiliki tempat tinggal biasanya menggunakan lahan kosong sebagai pemukiman liar. Ini berarti sedikit ruang kosong di kota.

2. Meningkatkan tingkat polusi di wilayah perkotaan

Untuk memulai aktivitas mereka, seperti bekerja atau sekolah, kebanyakan orang pergi ke kota dengan mobil atau sepeda motor. Jumlah kendaraan bermotor roda dua atau roda empat terus menerus membanjiri kota, menyebabkan polusi suara dan udara yang tidak proporsional. Bukan hanya kendaraan yang menyebabkan polusi, tetapi juga pertumbuhan industri.

²³ R. Jedwab *et al*, 2014, “*demography, Urbanization and Development Rural Push, Urban Pull and Urban Push?*”, *Work Paper*, Vol. 15, p. 31.

3. Penyebab terjadinya bencana alam

Di perkotaan, orang yang belum mempunyai rumah atau pekerjaan biasanya menggunakan lahan kosong di pusat kota dan di pinggiran DAS (Daerah Aliran Sungai) untuk membangun pemukiman dan bangunan bisnis. Karena lingkungan yang seharusnya menyerap air hujan dan aliran sungai tidak dapat lagi menampung, hal ini pasti akan menyebabkan banjir.

4. Pencemaran yang bersifat sosial dan ekonomi

Dampak yang diberikan cukup besar dari perspektif sosial. Pencemaran lingkungan seperti sungai yang kotor dan udara yang berbau dapat menurunkan kenyamanan dan menyebabkan penyakit seperti infeksi saluran pernafasan, kanker, dan gangguan kulit. Selanjutnya, konflik sosial yang disebabkan oleh aktivitas industrial dan komersil menimbulkan ketegangan antara pemerintah, perusahaan, dan warga yang terkena dampak langsung.

Selain itu, dari perspektif ekonomi, konsekuensi seperti kerugian finansial yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan, seperti pengelolaan limbah, rehabilitasi sungai atau penghijauan wilayah, sering kali sangat besar dan membebani anggaran baik pemerintah maupun swasta. Karena tingkat absensi akibat masalah kesehatan yang tinggi, penurunan produktivitas juga menyebabkan pencemaran udara. Pencemaran lingkungan mengurangi produksi pertanian dan perikanan karena kerusakan sumber daya alam. Dan berdampak pada sektor

pariwisata, yang akan mengurangi daya tarik wisatawan dan berdampak pada pendapatan lokal dari sektor pariwisata.²⁴

Sedangkan untuk dampak positif dari urbanisasi mencakup aspek sosial, ekonomi dan lingkungan yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Adapun dampaknya sebagai berikut:

1. Peningkatan ekonomi lokal dan regional

Pembangunan perkotaan, terutama dalam bidang infrastruktur dan perumahan, menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan bisnis lokal, dan meningkatkan daya saing lokal.

2. Memperoleh akses yang lebih baik ke fasilitas umum

Pembangunan perkotaan dengan perencanaan yang baik meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi kesenjangan sosial dengan memberikan akses lebih luas ke fasilitas kesehatan, sekolah, dan transportasi.

3. Kawasan kota yang ramah lingkungan

Banyak proyek pembangunan modern menggunakan teknologi ramah lingkungan, seperti bangunan hemat energi dan infrastruktur hijau, yang mengurangi jejak karbon dan meningkatkan keberlanjutan lingkungan di kota-kota.

²⁴ Sembiring, P. A. B., & Bangun, M., 2021, "Analisis Kebijakan Pengendalian Urbanisasi Kota Berastagi Kabupaten Karo Sumut", Hurnal Darma Agung, 29(1), 79-88.

4. Manajemen tata ruang yang efektif

Dengan menerapkan desain perkotaan yang ideal, pembangunan di kota membantu mengurangi kemacetan, meningkatkan ruang publik taman, dan memfasilitasi interaksi sosial yang lebih baik.

Solusi untuk menangani masalah urbanisasi perkotaan diperlukan karena memerlukan pendekatan komprehensif dan integritas. Solusi berikut dapat digunakan:

1. Pembangunan ekonomi di daerah pedesaan: mengurangi migrasi ke kota dengan meningkatkan peluang kerja dan infrastruktur di daerah pedesaan, bisa ada peningkatan lapangan kerja melalui program dukungan bagi usaha kecil dan pelatihan keterampilan.
2. Perencanaan tata ruang yang berkelanjutan: rencana tata ruang harus mempertimbangkan pertumbuhan populasi untuk bertahan.
3. Transportasi publik yang efisien: peningkatan sistem transportasi publik dapat mengurangi ketergantungan pada mobil pribadi. Investasi dalam moda transportasi massal seperti bus dan kereta api dapat mengurangi kemacetan dan polusi.
4. Pengelolaan Sumber Daya Air: memastikan semua warga kota memiliki akses air bersih melalui kebijakan yang berkelanjutan untuk mengelola air. Ini termasuk mengurangi penggunaan air tanah dan melindungi sumber air.
5. Partisipasi masyarakat: melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka.

6. Inovasi teknologi: menggunakan teknologi yang meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan kota, seperti sistem pemantauan kualitas udara dan aplikasi untuk pengelolaan sampah.

pembangunan perkotaan dan urbanisasi diharapkan berjalan dengan baik dan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat asli kota dan para pendatang.

2.3. Pembangunan Infrastruktur

2.3.1. Pengertian Pembangunan Infrastruktur

Menurut Ronald dalam Kamus Ekonomi *Routledge* (2002), infrastruktur merupakan pelayanan yang paling penting sebuah negara yang memiliki kemampuan untuk membantu ekonomi serta aktivitas masyarakat dengan membuat sarana dan prasarana serta fasilitas tambahan. Seperti yang telah dijelaskan, infrastruktur dapat didefinisikan sebagai bisnis atau kumpulan bisnis untuk melakukan pertumbuhan serta perombakan dengan tujuan membuat prasarana atau semua itu berfungsi sebagai pendukung utama proses pembangunan negara atau wilayah.

2.3.2. Penggolongan Infrastruktur

Dalam *World Development Report* (1994) infrastruktur di pecah menjadi 3 golongan di antaranya:

- a. Infrastruktur Ekonomi: aset fisik yang digunakan untuk produksi dan konsumsi serta sarana publik seperti telekomunikasi, air minum, sanitasi, dan gas. Saluran air, drainase, bendungan, jalan, transportasi pelabuhan, dan kereta api adalah bagian dari pekerjaan publik.

- b. Infrastruktur Sosial: sekolah, perpustakaan, dan tempat rekreasi seperti taman dan museum.
- c. Infrastruktur instansi dan administrasi termasuk penegak hukum, administrasi kependudukan, kebudayaan dan lainnya.

2.3.3. Pentingnya Pembangunan Infrastruktur

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, infrastruktur yang dibangun harus disesuaikan dengan kebutuhan setiap wilayah. Pentingnya pembangunan infrastruktur dapat dijelaskan dengan empat alasan utama, yaitu:

- a. Salah satu nilai utama dan langkah awal terbentuknya negara dan masyarakat yang adil dan makmur adalah pembangunan infrastruktur yang mampu menyediakan lapangan pekerjaan.
- b. Pembangunan infrastruktur dasar, kemajuan teknologi, dan kemajuan ilmiah akan berdampak langsung pada tingkat investasi.
- c. Infrastruktur memiliki pengaruh yang signifikan, bahkan menjadi faktor penentu dalam integrasi sosial ekonomi masyarakat.
- d. Pembangunan infrastruktur memungkinkan isolasi non fisik dan fisik di beberapa wilayah.²⁵

Berhubungan dengan hal-hal di atas, jelas bahwa peran pemerintah sangat diharapkan bisa menciptakan terobosan baru dalam kebijakan infrastruktur. Beberapa di antaranya adalah pemerintah harus mengevaluasi kembali dasar kebijakan infrastruktur sebelumnya, yang lebih banyak didasarkan pada nilai ekonomi dari proyek investasi dan jumlah penduduk di daerah tersebut. Ini sangat

²⁵ Gultom, R. Z., & Tini, A. Q., 2020, "Pembangunan infrastruktur dalam islam: Tinjauan ekonomi dan sosial", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(2), 203-211.

penting karena jika pertumbuhan indikator tersebut digunakan sebagai referensi kebijakan untuk pembangunan infrastruktur, daerah dengan populasi rendah akan tertinggal. Untuk mencegah urbanisasi atau pemusatan jaringan infrastruktur di kota-kota, kebijakan infrastruktur harus ditetapkan.²⁶

Melihat betapa pentingnya infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, para pakar infrastruktur setuju bahwa pemerintah adalah pihak mutlak yang paling bertanggung jawab dalam mendorong pembangunan infrastruktur. Pemerintah harus memastikan investasi terus menerus dalam pembangunan infrastruktur dan memberikan prioritas kepada infrastruktur dalam rencana pembangunan nasional, sehingga infrastruktur dapat diperbarui baik secara kuantitas dan kualitas.²⁷

Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, berdasarkan penelitian Dirmawati et al (2023) menyatakan proses produksi dan distribusi barang dan jasa dapat ditingkatkan dengan bantuan infrastruktur, yang merupakan katalisator utama. Misalnya, jalan yang baik dan jaringan transportasi yang terintegrasi dapat menurunkan biaya logistik dan waktu tempuh, meningkatkan daya saing produk di pasaran (Soumena et al, 2024). Maka, pembangunan infrastruktur yang di rencanakan dengan baik memiliki potensi untuk menciptakan lapangan pekerjaan, menarik sejumlah investasi asing, dan memperkuat sektor ekonomi yang dimaksudkan secara strategis.

²⁶ Nss, R. L. P., Suryawardana, E., & Triyani, D., 2015, “Analisis dampak Pembangunan infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan usaha ekonomi rakyat di Kota Semarang”, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 17(1), 82-103.

²⁷ Posumah, F., 2015, “Pengaruh Pembangunan infrastruktur terhadap investasi di Kabupaten Minahasa Tenggara”, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(13).

Namun demikian, pembangunan infrastruktur menghadapi banyak tantangan. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan anggaran, birokrasi yang rumit, dan masalah tata kelola yang sering menghambat proyek (Sapitri et al, 2024). Untuk memastikan bahwa manfaat dari pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, strategi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan sangat penting.

Salah satu kebijakan pengembangan infrastruktur yang saat ini paling disoroti adalah masalah kebijakan investasi, yaitu aspek-aspek yang berkaitan dengan memilih infrastruktur yang harus cepat ditangani, dasar kriteria investasi, penentuan investor, dan menentukan pola untuk dilakukan investasi.

Pemerintah membantu mempercepat penyediaan infrastruktur dengan memberikan kompensasi dalam bentuk kerja sama, investasi, garansi, dan penghapusan pajak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005.

2.3.4. Macam-macam Pembangunan Infrastruktur di Perkotaan

pembangunan infrastruktur perkotaan terdiri dari berbagai macam komponen yang dimaksudkan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat, meningkatkan mobilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Macam-macam pembangunan infrastruktur perkotaan adalah sebagai berikut:

A. Infrastruktur Transportasi

Infrastruktur transportasi terdiri dari fasilitas fisik permanen yang digunakan untuk memulai, menjalani, dan mengakhiri perjalanan. Contoh fasilitas ini termasuk jalan raya, rel, air (sungai, danau, dan laut), udara, terminal bus, stasiun

kereta api, pelabuhan, bandar udara, dan sebagainya. Di sini, transportasi terdiri dari bagian-bagian yang berbeda sesuai dengan manfaat media yang diembannya, yaitu jalur gerak untuk melakukan pergerakan pindah dan terminal untuk memulai dan mengakhiri pergerakan pindah.

B. Infrastruktur Energi

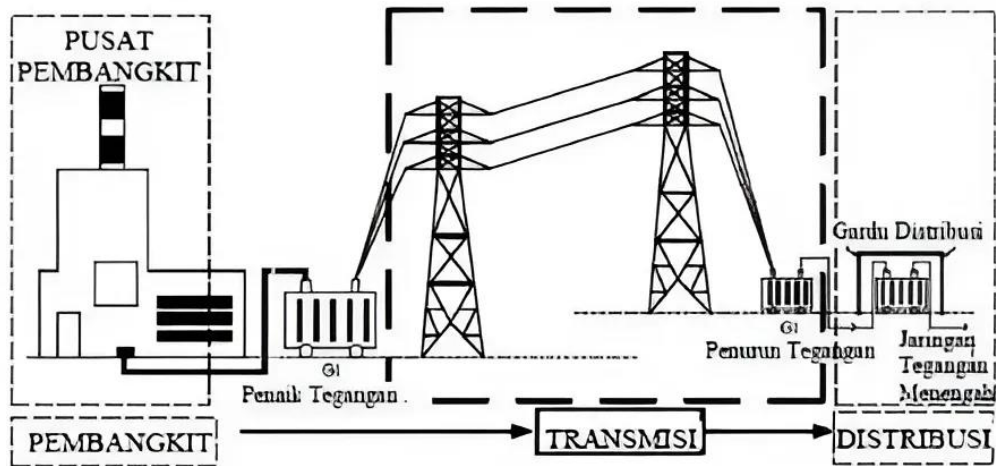
Sistem fisik dan teknologi yang digunakan untuk menghasilkan, mengolah, menyimpan, mendistribusikan, dan mengelola energi untuk memenuhi kebutuhan manusia dan industri disebut infrastruktur energi atau sering disebut infrastruktur listrik. Infrastruktur ini termasuk pembangkit listrik, jaringan transmisi dan distribusi, fasilitas penyimpanan, dan instalasi energi terbarukan seperti panel surya dan turbin angin.

Karena energi diperlukan untuk transportasi, komunikasi, industri, dan rumah tangga, infrastruktur energi sangat penting untuk mendukung aktivitas perkotaan. Pengembangan infrastruktur energi juga melibatkan penggunaan teknologi terbarukan dan sistem *smart grid* untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan energi.

Pembangkit listrik adalah komponen utama infrastruktur listrik, serta jaringan listrik (transmisi dan distribusi), gardu listrik (komponen kedua), dan komponen listrik (komponen utama). Proses dari hulu ke hulu, dari produksi listrik ke pengguna, dikenal sebagai infrastruktur listrik.²⁸

²⁸ Pratama, I. C., Jinca, M. Y., & Sutopo, Y. K. D., 2019, "Strategi Pengembangan Infrastruktur Energi Listrik untuk Mewujudkan Makassar Sustainable City", Jurnal Penelitian Enjiniring, 23(1), 79-90.

Berikut adalah gambar skema komponen listrik:



Gambar 2.2 Komponen Infrastruktur Listrik

C. Infrastruktur Air dan Sanitasi

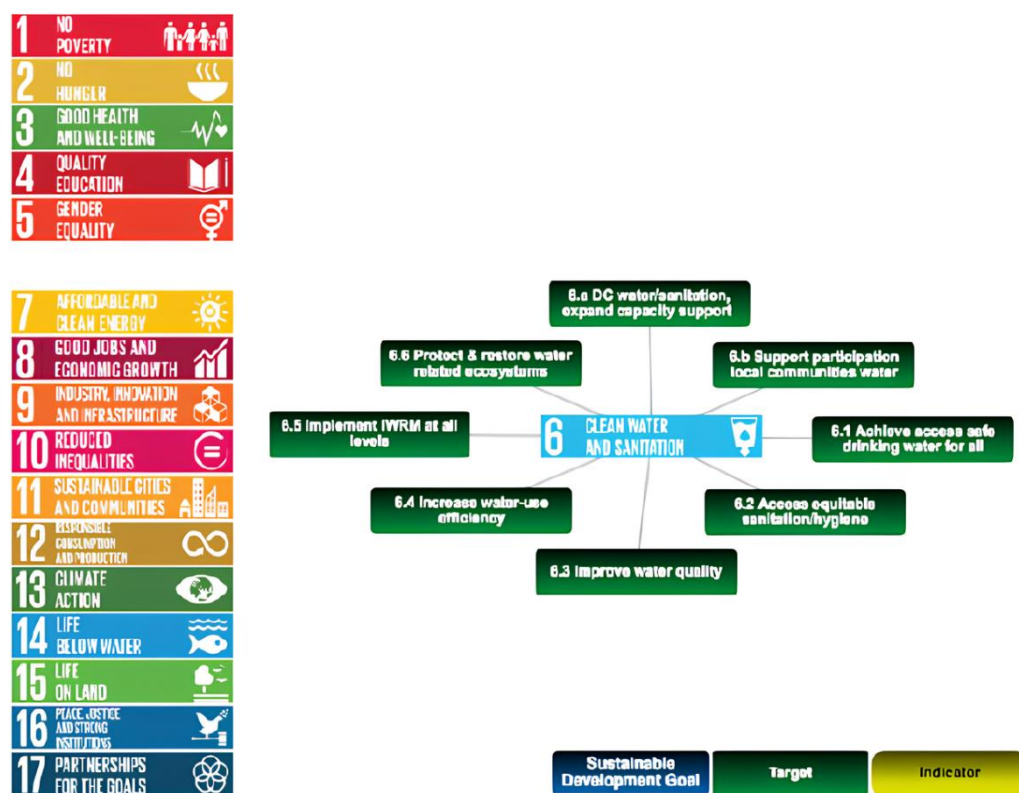
Sanitasi dan air adalah satu kesatuan. Pasti ada air dan limbah di setiap tempat yang ada air minum atau air bersih.

Air bersih dan sanitasi yang baik sangat penting untuk menjaga kesehatan manusia. Sayangnya, kebutuhan air bersih dan sanitasi masih belum sepenuhnya dipenuhi di beberapa belahan dunia. Sebenarnya, ada cukup air di planet ini untuk memenuhi kebutuhan penting ini. Namun, pasokan air yang tidak memadai dan sanitasi yang buruk adalah alasan utama kematian jutaan orang setiap tahun sebagai akibat dari kondisi ekonomi yang buruk dan infrastruktur yang rusak.

Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, membuat agenda global baru yang menadopsi 17 tujuan yang disebut tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Selain itu, dari 17 tujuan tersebut, tujuan

keenam (SDG 6) adalah air bersih dan sanitasi, dengan tujuan utama menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang. SDG 6 menyatakan bahwa setiap orang di muka bumi harus memiliki akses terhadap air minum yang aman dan terjangkau. Gambar 2.3 berikut menunjukkan kedudukan SDG 6 dan targetnya:

Gambar 2.3 SDG 6 : *Clean Water and Sanitation*



Sumber: PBB (2015)

Gambar 6 menunjukkan sasaran capaian untuk SDG 6 sebagai berikut:

1. Semua orang memiliki akses mudah dan aman ke air minum.
2. Mengakhiri buang air besar sembarangan dan akses sanitasi dan kebersihan yang memadai dan layak untuk semua, memberikan

perhatian khusus pada kebutuhan perempuan dan anak perempuan serta orang dalam situasi rentan.

3. Dengan mengurangi polusi, timbunan sampah, dan pembuangan bahan kimia berbahaya, dan dengan mengurangi jumlah air limbah yang tidak ditangani, kualitas air akan ditingkatkan.
4. Untuk mengatasi kelangkaan air dan secara signifikan menurunkan jumlah masyarakat yang menderita kelangkaan air, penggunaan air yang lebih efisien dan setiap sektor dan memastikan pasokan dan pengambilan air tawar tetap beroperasi.
5. Pengelolaan sumber daya air yang komprehensif, termasuk kolaborasi lintas batas yang sesuai.
6. Perlindungan dan perbaikan ekosistem air seperti pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, akuifer, dan danau.
7. Perluasan kerja sama dan pengembangan kapasitas untuk mendukung negara berkembang dalam program dan inisiatif yang berkaitan dengan air bersih dan sanitasi serta,
8. Memperkuat dan mendukung komunitas lokal untuk meningkatkan pengelolaan air dan sanitasi.²⁹

D. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Berbagai perspektif kehidupan memengaruhi budaya, seperti halnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Seperti yang dinyatakan oleh Bucur dan Petra (2011), komunikasi sangat penting untuk pengembangan setiap negara

²⁹ Elysia, V., 2018, “ Air Dan Sanitasi: Dimana Posisi Indonesia?”. <https://core.ac.uk/download/pdf/198237302.pdf>. Diakses tanggal 12 Desember 2024.

karena memiliki peran penting dalam pengakuan, pengendalian, penyelesaian, dan pengendalian pemeliharaan. Keempat peran yang disebutkan di atas berkaitan dengan fungsi media massa, sebagai alat pengembangan, media massa digunakan untuk membantu pemerintah berkomunikasi dengan orang-orang di negara yang terlibat.

Dalam perkotaan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sangat penting karena semua sistem, baik langsung maupun tidak langsung, telah berkembang sehingga mempermudah segala aktivitas masyarakat.³⁰

E. Infrastruktur Pendidikan dan Kesehatan

Pendidikan adalah upaya sadar dan terencana para siswa untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang memungkinkan mereka secara aktif mengembangkan potensi diri mereka menjadi individu yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang bermanfaat bagi diri mereka sendiri dan orang-orang di sekitar mereka.

Menurut Hasbullah (2005: 1), pendidikan dapat didefinisikan sebagai upaya manusia untuk membangun kepribadian mereka sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di masyarakat dan kebudayaan. Pada dasarnya, pendidikan adalah melakukan tes yang tidak pernah berakhir sepanjang hidup manusia. Dikatakan demikian karena pendidikan adalah bagian dari kebudayaan manusia yang selalu berubah. Hal ini sejalan dengan pembawaan manusia, yang memiliki kemampuan menjadi inovatif dan kreatif dalam aspek kehidupan.

³⁰ Lubis, A. Y., 2017, "Penerapan Teknologi Dan Komunikasi Di Infrastruktur Negara Berkembang", WACANA, Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi, 16(2), 225-236.

Pendidikan di kota sangat berbeda dari di desa, di kota ada banyak informasi dan internet, sedangkan di desa, mungkin sebaliknya. Di desa berkomitmen untuk mendapatkan pendidikan meskipun jarang mengetahui apa yang terjadi di luar sana. Mereka juga berusaha mendapatkan pendidikan yang lebih baik daripada yang mereka dapatkan di kota. Banyak orang desa yang merantau ke kota untuk memperoleh pendidikan tinggi. Mereka pasti akan senang dengan sekolah-sekolah di kota karena informasinya.³¹

Namun, proyek pembangunan nasional mencakup semua aspek kehidupan, termasuk infrastruktur kesehatan. Pembangunan kesehatan adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya mendukung percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional karena pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Menurut Todaro (2002), kesehatan adalah salah satu faktor yang menentukan seberapa baik atau buruk standar hidup seseorang. Oleh karena itu, manusia membutuhkan status kesehatan yang relatif baik untuk menopang semua aktivitas hidupnya. Oleh karena itu, sarana kesehatan yang baik juga diperlukan untuk mencapai status kesehatan yang baik tersebut.

Dari perspektif ekonomi, aspek penting dari faktor kesehatan bagi manusia akan terkait erat dengan kualitas sumber daya manusia (SDM). Status kesehatan, pendidikan dan tingkat pendapatan per kapita akan menentukan kualitas SDM yang

³¹ Anas, A. Y., Riana, A. W., & Apsari, N. C., 2015, "Desa dan Kota dalam potret Pendidikan", *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 418-422.

rendah. Indeks pembangunan manusia suatu negara akan dipengaruhi secara tidak langsung oleh ketiga indikator kualitas sumber daya manusia tersebut dalam aktivitas ekonomi.

Sebagai indikator kesejahteraan rakyat, tujuan jangka panjang pembangunan kesehatan Indonesia adalah untuk meningkatkan kesadaran, keinginan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap warga negara Indonesia. tujuan ini akan dicapai melalui pembangunan kesehatan masyarakat yang seoptimal mungkin.

Infrastruktur kesehatan adalah salah satu komponen penting dalam mencapai kemajuan dalam bidang kesehatan Indonesia. menurut *World Health Organization* (WHO), kesehatan adalah kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial, bukan hanya bebas dari penyakit atau kelemahan fisik. Dalam praktiknya, tingkat harapan hidup digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan seseorang. Salah satu dari tiga komponen yang diperlukan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran ini.³²

Menurut penjelasan di atas, infrastruktur pendidikan dan kesehatan sangat penting untuk pembangunan yang berkelanjutan. Keduanya harus dikembangkan secara bersamaan jika kita ingin membuat masyarakat yang cerdas, sehat, dan produktif.

³² Pohan, M., & Halim, R., 2016, "Analisis Ketersediaan Infrastruktur Kesehatan dan Aksesibilitas terhadap Pembangunan Kesehatan Penduduk di Provinsi Sumatra Utara", *Jurnal Ekonomikawan*, 16(1), 77652.

2.4. Pembangunan Jalan

2.4.1. Pengertian Jalan

Jalan merupakan salah satu sarana transportasi penting yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan umum. Sumber daya alam dan proses yang ada di dalamnya dilindungi dan ditingkatkan melalui jalan yang berkelanjutan. Komunitas yang dimaksud mencakup aspek sosial, ekonomi, kesejahteraan, budaya, dan estetika. Solusi sensitif juga dikenal dengan *Contextsensitive solution* digunakan untuk elemen komunitas. Oleh karena itu, jalan berkelanjutan menunjukkan keterlibatan masyarakat dan pola pembangunan suatu kota atau wilayah.

Banyak studi sejarah telah menunjukkan bahwa jalan merupakan sarana penting untuk pertumbuhan dan perkembangan peradaban, dan merupakan salah satu infrastruktur terpenting dalam mendukung dan mempercepat aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya suatu masyarakat.

Menurut Oglesby dan Hiks (1998, h.181), mengatakan bahwa jalan memiliki banyak fungsi, termasuk memberikan layanan dan mobilitas antar masyarakat, memungkinkan pergerakan orang dan barang di setiap lingkungan, dan memberikan jalan masuk ke tempat tinggal. Namun, menurut mereka, fungsi yang paling penting adalah memberikan pelayanan pemerintahan dan mobilitas antar masyarakat.

Menurut Parikesit (2022, h.97), perbaikan kondisi prasarana jalan akan menguntungkan masyarakat secara sosial dan ekonomi, karena akan meningkatkan

ekonomi lokal, meningkatkan produksi pangan, dan membantu menyatukan komunitas terpencil ke dalam perekonomian yang lebih besar.

Dalam hal ini, Undang-undang jalan nomor 38 Tahun 2024 mempertimbangkan beberapa hal yang membentuknya:

- a. Bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan untuk penting dalam pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial, dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional;
- c. Bahwa untuk terpenuhi peranan jalan sebagaimana mestinya, pemerintah mempunyai hak dan kewajiban menyelenggarakan jalan;

- d. Bahwa agar penyelenggaraan jalan dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna diperlukan keterlibatan masyarakat;
- e. Bahwa dengan adanya perkembangan otonomi daerah, tantangan persaingan global, dan tuntutan peningkatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang jalan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3186) tidak sesuai lagi sebagai landasan hukum pengaturan tentang jalan;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu dibentuk undang-undang tentang jalan.³³

Dilihat dari hal-hal di atas, pasti ada banyak masalah selama proses pembangunan jalan. Empat masalah yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan finansial: tidak semua desa memiliki kemampuan untuk membangun dan merawat jalan dengan baik karena anggaran yang tersedia terbatas. Oleh karena itu, diperlukan untuk lebih banyak dari pemerintah pusat dan daerah untuk membangun jalan.
2. Geografis dan topografi area: desa tertentu mungkin memiliki topografi dan geografi yang rumit. Akibatnya, pembangunan jalan di daerah tersebut

³³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, <https://jdih.pu.go.id/internal/assets/assets/produk/UU/2014/10/UU38-2004.pdf>, Diakses Tanggal 25 Desember 2024.

menjadi sulit serta mahal karena perlu membangun jembatan, mengeringkan tanah, atau menggali terowongan.

3. Kurangnya tenaga kerja terlatih: pembangunan jalan desa berkualitas tinggi membutuhkan tenaga kerja yang terlatih dalam teknik konstruksi dan pemeliharaan jalan. Di beberapa daerah, kurangnya tenaga kerja terlatih menyebabkan masalah.
4. Ketahanan jalan terhadap cuaca ekstrem: jalan di desa harus dirancang dan dibangun dengan sangat tahan terhadap cuaca ekstrem agar orang dan kendaraan dapat melewatinya di segala cuaca. Desa-desa sering kali berada di daerah di mana cuaca ekstrem seperti hujan deras, banjir, atau tanah longsor dapat terjadi.

Solusi yang efektif diperlukan untuk mengatasi masalah dalam pembangunan infrastruktur jalan desa. Beberapa solusi yang dapat digunakan antara lain:

1. Alokasi anggaran yang memadai: agar tidak ada desa yang tertinggal dalam pembangunan jalan desa, pemerintah pusat dan daerah harus mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pembangunan infrastruktur jalan desa. Ini harus dilakukan dalam perencanaan pembangunan tahunan dan jangka panjang.
2. Penyediaan tenaga kerja yang terampil: untuk meningkatkan kualitas pembangunan jalan desa dan menciptakan lapangan kerja, pemerintah harus memberikan pelatihan dan pendidikan kepada tenaga kerja di wilayah pedesaan.
3. Penggunaan teknologi: dalam pembangunan jalan desa, teknologi seperti penggunaan alat berat, metode konstruksi yang efisien, dan bahan bangunan

yang berkualitas tinggi dapat membantu mempercepat proses konstruksi dan meningkatkan kualitas jalan.

4. Perencanaan yang baik: perencanaan yang matang sebelum pembangunan dimulai akan membantu mengatasi masalah seperti geografis dan topografi wilayah. Perencanaan yang baik juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan jalan desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing wilayah.

Ada banyak keuntungan bagi masyarakat dari adanya infrastruktur jalan saat ini seperti:

1. Membuka isolasi geografis: jalan-jalan akan membuka daerah dan komunitas yang sebelumnya terisolasi. Perubahan sosial, yang merupakan syarat penting untuk proses pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat, akan terjadi dengan lebih cepat ketika wilayah lebih terbuka.
2. Meningkatkan aktivitas dan mendukung roda ekonomi dan kelancaran wilayah: jalan akan mempermudah distribusi dan pemasaran suatu komoditi, mendorong aktivitas dan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.
3. Mengakses teknologi dan memanfaatkan fasilitas sosial seperti, pendidikan, kesehatan, dan rencana pemindahan ibu kota kabupaten pemerintah.
4. Meningkatkan mobilitas.
5. Mendukung perekonomian.

2.4.2. Macam-macam Jalan

Jalan di perkotaan memiliki berbagai macam jenis yang dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi dan penggunaannya. Berikut adalah penjelasan tentang jenis-jenis jalan yang umum ditemukan di kawasan perkotaan:

1. Jalan Arteri

Memiliki karakteristik perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata yang tinggi, dan jumlah akses jalan yang masuk dibatasi secara efektif, jalan arteri adalah jalan umum yang digunakan untuk melayani angkutan umum. Untuk contoh jalan arteri adalah jalan protokol yang menghubungkan pusat kota dengan wilayah pinggiran.

2. Jalan Kolektor

Jalan kolektor merupakan jalan umum yang digunakan untuk angkutan pengumpulan atau distribusi. Ini memiliki jarak perjalanan menengah, kecepatan rata-rata sedang, dan batasan jumlah akses jalan masuk.

Jalan kolektor memiliki karakteristik untuk mengalirkan lalu lintas dari jalan lokal ke jalan arteri. Jalan yang menghubungkan pemukiman dengan jalan utama adalah contoh jalan dengan kecepatan sedang yang digunakan oleh kendaraan umum.

3. Jalan Lokal

Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani lalu lintas setempat. Jalan ini memiliki karakteristik perjalanan jarak pendek, kecepatan rata-rata rendah,

dan ada batasan jumlah akses jalan masuk. Jalan dalam kompleks perumahan atau area komersial adalah contoh jalan lokal ini.

4. Jalan Lingkungan

Jalan lingkungan adalah jalan umum yang melayani transportasi di daerah sekitar dengan jarak dekat dan dengan kecepatan rata-rata rendah. Karakteristik dari jalan lingkungan adalah jalan ini lebih kecil daripada jalan kolak, sering kali hanya satu arah, dan dibangun untuk memungkinkan akses langsung ke bangunan. Contohnya yaitu gang atau jalan di area pasar.³⁴

2.4.3. Pembangunan Jalan di Surabaya

Pemerintah Kota Surabaya berkomitmen untuk membangun infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada tahun 2024. Kantor pelayanan publik, fasilitas publik untuk pejalan kaki, konektivitas saluran, rumah sakit, dan pembangunan jalan telah dilakukan.

Pada bulan Februari Tahun 2024, Pemerintah Kota memperbaiki infrastruktur di wilayah Surabaya bagian Barat. Salah satunya merupakan upaya mengatasi banjir yang dilakukan di daerah Kecamatan Pakal dan Kecamatan Benowo, yang mencakup pembangunan tanggul serta penyempurnaan jembatan jalan Raya Tengger.

³⁴ Auto2000, 2023, "Klasifikasi Jalan Raya", <https://auto2000.co.id/berita-dan-tips/klasifikasi-jalan-raya>, Diakses tanggal 25 Desember 2024.

Pada bulan itu juga, Pemerintah Kota Surabaya sedang mengerjakan *box culvert*³⁵ di antara Jembatan Raci Benowo dan Jalan Babat Jerawat. Menurut Wali Kota Pak Eri, saluran Kali Raci Benowo akan dibangun pada tahun 2025, dan Kabupaten Gresik akan dihubungkan pada tahun 2026 (kominfo.jatimprov.go.id)

Pemkot Surabaya bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk membangun *underpass* simpang bundaran Taman Pelangi pada Maret 2024. Tahap berikutnya dari proyek ini adalah pembebasan lahan. Pak Eri mengatakan bahwa mereka membangun 16 rumah pompa dari tahun 2023 hingga 2024.

Pak Eri Cahyadi selaku Wali Kota dan jajaran Staf PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) mengumumkan peluncuran Jalan *Flyover* (FO) teluk Lamong Suraba, yang panjangnya 2,4km. FO dimaksudkan untuk meningkatkan aliran kendaraan umum dari Pelabuhan dan ke Pelabuhan Teluk Lamong Surabaya.

Dengan tujuan untuk mengurangi banjir pada daerah Nambangan. Tambak Deres, dan Bulak Surabaya, Pemkot Surabaya mendirikan rumah pompa baru di Kecamatan Bulak pada awal September 2024.

Sebaliknya, Pemkot Surabaya juga mengaspal beberapa jalan utama di Kota Pahlawan. Ini dimulai dari Jalan Ahmad Yani hingga Tugu Pahlawan dan sebaliknya. Menurut Wali Kota Pak Eri, pengaspalan jalan akan dilakukan di daerah lain Surabaya.

Pada bulan yang sama, Pemerintah Kota Surabaya sedang mengerjakan sejumlah proyek infrastruktur. Ini termasuk Jalan Mayjen Sungkono, Jalan

³⁵ *Box Culvert* adalah nama produk beton pracetak berbentuk kotak yang diproduksi dengan menggunakan cetakan besi dengan tujuan pembuatannya untuk kepentingan saluran dalam tanah atau goroong-gorong.

Ciliwung – Jalan Kutai, Jalan Kartini, Jalan Raya Babatan Wiyung – Menganti hingga Jalan Radial.

Selain itu, saluran *Corrugate Concrete Sheet Pile* (CCSP) di Jalan Raya Wiyung – Menganti juga akan dipasang dan diaspal pada November 2024. Pemerintah pusat membantu Pembangunan jalan dan saluran untuk mengurangi kemacetan ini.

Pada titik tertingginya, pada 23 Desember 2024, Pemkot Surabaya mulai mengoperasikan fasilitas umum yang disebut terowongan untuk pejalan kaki. Tujuan dari pembangunan ini, yang menghubungkan Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ) ke Kebun Binatang Surabaya (KBS), adalah untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan konektivitas.

Seperti yang disebutkan di atas, Pemerintah Surabaya berencana membangun jalan baru pada tahun 2024 untuk mengurangi kemacetan dan banjir serta meningkatkan produktivitas.³⁶

2.5. Pembangunan Berkelanjutan

2.5.1. Pengertian Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan, menurut Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta

³⁶ Dinas Kominfo Jawa Timur, 2025, “Pemkot Surabaya Geber Pembangunan Infrastruktur Menuju Kota Berkelanjutan”, <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/kaleidoskop-2024-pemkot-surabaya-geber-pembangunan-infrastruktur-menuju-kota-berkelanjutan>, Di akses tanggal 5 Januari 2025.

keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa mendatang. Hal-hal yang mendukung sifat berkelanjutan dapat digambarkan dapat menjadi tiga pilar, yaitu aspek sosial (dikenal dengan kebutuhan standar manusia), aspek lingkungan (dikenal sebagai ekologi atau bumi), dan aspek ekonomi (dikenal dengan uang atau keuntungan).

Menurut Sutamihardja (2004), menyatakan bahwa sasaran pembangunan berkelanjutan mencakup pada upaya untuk mewujudkan terjadinya:

- a. Persamaan manfaat hasil pembangunan antar generasi, juga dikenal sebagai kesetaraan antar generasi, bahwa penggunaan sumber daya alam untuk kemajuan harus mempertimbangkan batas wajar di dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan, fokus pada sumber daya alam yang dapat diganti, dan menekankan bahwa eksploitasi sumber daya alam yang tidak dapat diganti serendah mungkin,
- b. Menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup saat ini serta mencegah gangguan terhadap ekosistem untuk memastikan kualitas hidup baik untuk generasi berikutnya,
- c. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam semata-mata untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan demi kepentingan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk generasi berikutnya,
- d. Menjaga kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan baik saat ini maupun di masa depan,
- e. Menjaga keuntungan dari pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang memiliki efek lestari dan jangka panjang,

- f. Menjaga dan standar kualitas kehidupan manusia untuk generasi berikutnya sesuai dengan lingkungan.

Sutamihardja (2004) juga menyatakan dalam pembangunan berkelanjutan, tabrakan kebijakan yang terjadi antara menggali sumber daya alam untuk mengurangi kemiskinan dan kebutuhan untuk mencegah degradasi lingkungan harus dihindari dan sejauh mungkin berjalan secara seimbang.³⁷

2.5.2. Teori Pembangunan Berkelanjutan

Pada teori pembangunan berkelanjutan, teori ini lebih menekankan bahwa pembangunan yang mempertimbangkan elemen sosial, ekonomi, dan lingkungan sangat penting. Pembangunan berkelanjutan dalam perkotaan berfokus pada pembangunan kota yang ramah lingkungan, inklusif, dan tahan lama.

Pembangunan berkelanjutan itu sendiri merupakan hasil dari persetujuan yang dicapai di KTT Bumi, juga dikenal dengan konferensi Rio, yang merupakan salah satu konferensi utama PBB yang diadakan di Rio de Janeiro, Brasil, dari tanggal 3 Juni hingga 15 Juni 1992. Pertemuan internasional ini dihadiri oleh 172 negara, termasuk 108 Kepala Negara atau Kepala Pemerintahannya. 2.400 perwakilan dari organisasi non-pemerintahan hadir di kegiatan paralel organisasi. Deklarasi Rio tentang lingkungan dan pembangunan, Agenda 21 dan prinsip-prinsip hutan adalah hasil KTT Bumi. Negara-negara yang berpartisipasi juga

³⁷ Rahadian, A. H., 2016, "Strategi Pembangunan berkelanjutan", Prosiding Seminar STIAMI, Vol. 3, No. 1, pp. 45-56.

menandatangani konvensi keanekaragaman hayati dan konvensi kerangka kerja PBB tentang perubahan iklim (UNFCCC).³⁸

2.5.3. Komponen dan Pilar Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhinya. Ini dilakukan dengan mengutamakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial.

Pembangunan berkelanjutan membutuhkan kesetaraan antara tiga perspektif kehidupan seperti sosial, lingkungan, dan ekonomi. Setiap perspektif terdiri dari lima belas komponen, yang dibahas secara menyeluruh dalam berbagai aspek dan aktivitas. Pembangunan berkelanjutan adalah cara untuk mengatasi krisis sosial dan ekonomi serta krisis lingkungan.

³⁸ Pertiwi, N., 2017, “Implementasi Sustainable Development di Indonesia”, Bandung, Pustaka Ramadhan.

Tabel 2.3 Perspektif dan Komponen Pembangunan Berkelanjutan

3 Perspektif dan Komponen Pembangunan Berkelanjutan		
Sosial	Lingkungan	Ekonomi
1.1 HAM	2.1 SDA: (i) Pelestarian, konservasi, rehabilitasi (reboisasi), (ii)	3.1 Pengurangan kemiskinan
1.2 Keamanan	Pengelolaan & pemanfaatan	3.2 Tanggung jawab
1.3 Kesenjangan gender	(pendayagunaan); Eksplorasi &	perusahaan: meningkatkan
1.4 Keragaman budaya & pemahaman lintas budaya	eksploitasi	kesehatan, akses & kualitas pendidikan
1.5 Kesehatan	2.2 Perubahan iklim	3.3 Ekonomi pasar:
1.6 HIV/AIDS	2.3 Pembangunan perdesaan	kewirausahaan, dll.
1.7 Tata kelola	2.4 Urbanisasi berkelanjutan	
	2.5 Pencegahan & penanganan bencana (mitigasi)	

Sumber: Unesco, 2005

Kelima belas komponen yang terdapat pada Tabel 2.3 dianggap dapat memayungi semua aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, jika kehidupan kita selaras dengan komponen-komponen, kita dapat mencapai pembangunan berkelanjutan.

Untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan ini termasuk pengelolaan yang ramah lingkungan yang mungkin dan penciptaan kesempatan yang merata bagi setiap orang.

Selain itu, pembangunan berkelanjutan juga harus bertumpu pada kekuatan yang menentukan bentuk dan karakteristik ekosistem, ketiga pilar pembangunan berkelanjutan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pilar Ekonomi

Pilar ekonomi berkonsentrasi pada perubahan sistem yang lebih ramah lingkungan. Tujuannya adalah untuk menerapkan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Banyak elemen membentuk masalah atau materi pada pilar ini. ini termasuk produksi, pola konsumsi, teknologi bersih, pendanaan dan pembiayaan, kemitraan usaha, pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri, dan perdagangan.

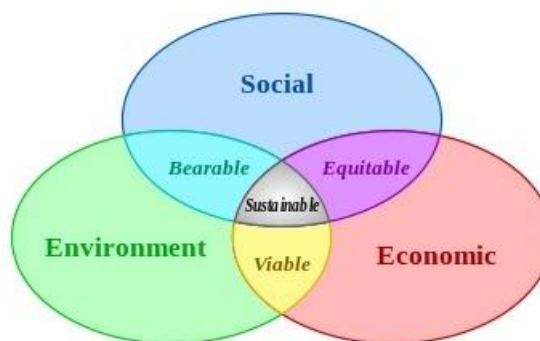
2. Pilar Sosial

Dalam hal pelestarian lingkungan hidup, pilar sosial menekankan pada pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan hukum, pengawasan, kemiskinan, kesehatan, dan kearifan lokal dan budaya.

3. Pilar Lingkungan

Pengelolaan sumber daya air, lahan, udara, laut, energi, dan mineral adalah pilar lingkungan yang sangat penting untuk pengelolaan SDA dan lingkungan secara menyeluruh.

Gambar 2.4 Skema Pembangunan Berkelanjutan



Sumber: Unesco, 2001

Berdasarkan skema di atas, dapat dijelaskan bahwa ketiga pilar memiliki hubungan satu sama lain dan akan membentuk relasi yang berbeda. Relasi ini akan mengarah pada pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yang merupakan tujuan akhir dari hubungan tersebut. Penjelasanannya adalah sebagai berikut:

a. Pilar Sosial dan Pilar Ekonomi

Sebuah komponen yang disebut dengan adil (*Equitable*) akan terbentuk dari hubungan antara pilar sosial dan pilar ekonomi. Di sini, adil berarti bahwa keuntungan dari pembangunan harus didistribusikan dan dirasakan secara merata di seluruh masyarakat, sehingga tidak ada kelompok yang tertinggal atau menderita akibat ketidakmerataan.

b. Pilar Sosial dan Pilar Lingkungan

Komponen yang disebut lumayan atau dapat ditahan (*bearable*) akan terbentuk dari hubungan antara pilar sosial dan pilar lingkungan. Ini berarti bahwa dalam kehidupan sosial, pengaruh lingkungan harus dipertahankan untuk mendukung pembangunan yang harmonis.

c. Pilar Lingkungan dan Pilar Ekonomi

Komponen yang disebut giat (*viable*) mengacu pada hubungan antara pilar ekonomi dan lingkungan. Faktor lingkungan memberikan sumber daya yang dapat digunakan oleh orang untuk mendukung perekonomian selama pembangunan.

2.5.4. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) adalah rencana pembangunan global yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan melindungi bumi melalui 17 tujuan sampai tahun 2030. Berikut adalah ketujuh belas SDGs:

1. Tanpa Kemiskinan

Mereka bercita-cita untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di seluruh dunia pada tahun 2030, dengan penekanan khusus pada pengentasan kemiskinan ekstrem dan pemberdayaan mereka yang hidup dalam situasi yang rentan.

2. Tanpa Kelaparan

Memastikan bahwa setiap orang memiliki akses ke makanan yang aman dan bergizi, mengakhiri kelaparan, dan meningkatkan gizi, serta mendukung pertanian berkelanjutan, adalah tujuan utama.

3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Salah satu SDG adalah kesehatan umum dan kesejahteraan masyarakat. SDG ini mencakup upaya untuk mengurangi angka kematian, mengontrol penyebaran penyakit menular, dan meningkatkan akses ke layanan yang lebih murah.

4. Pendidikan Berkualitas

Untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses ke pendidikan yang adil, inklusif dan berkualitas. Fokus pada penyediaan peluang pendidikan sepanjang hidup, pemberdayaan guru, dan peningkatan kualitas pendidikan.

5. Kesenjangan Gender

Tujuannya adalah untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. Ini mencakup penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan serta memastikan partisipasi yang setara dalam semua bidang.

6. Air Bersih dan Sanitasi

Menciptakan akses universal terhadap air bersih dan sanitasi yang aman. Tujuan ini berfokus pada pengelolaan air yang berkelanjutan, mencegah polusi air, dan mengurangi jumlah orang yang tidak memiliki akses ke sanitasi yang layak.

7. Energi Bersih dan Terjangkau

Tujuannya adalah untuk memberikan akses universal terhadap energi modern, murah, handal, berkelanjutan. Salah satu SDG ini adalah mendorong energi terbarukan dan efisiensi energi.

8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Tujuan ini adalah untuk menciptakan pekerjaan yang layak, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan perlindungan sosial bagi semua. Tujuan ini menekankan pentingnya menciptakan peluang pekerjaan produktif serta kondisi pekerjaan yang layak.

9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Menciptakan industri yang berkelanjutan, mendorong inovasi dan membangun infrastruktur yang kokoh. Salah satu tujuan dari SDG ini adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui industrialisasi yang berkelanjutan.

10. Berkurangnya Kesenjangan

Mempromosikan inklusif dan mengurangi kesenjangan nasional dan internasional. Mengurangi ketidaksetaraan pendapat dan mendukung kelompok renta.

11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

Tujuannya adalah untuk membuat kota dan pemukiman manusia ramah, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Perhatikan pelestarian dan pemulihan warisan budaya, akses transportasi umum, dan tata kota yang baik.

12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

Mempromosikan konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Tujuan ini menunjukkan betapa pentingnya menggunakan sumber daya dengan benar. Mengelola limbah dengan benar, dan membuat produk yang ramah lingkungan.

13. Penanganan Perubahan Iklim

Mengejar upaya global untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Tujuannya mencakup mengurangi emisi gas rumah kaca, melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim, dan meningkatkan ketahanan terhadap bencana alam.

14. Ekosistem Lautan

Tujuannya adalah untuk melestarikan dan menggunakan sumber daya laut secara berkelanjutan. Fokusnya adalah menjaga ekosistem laut, mengurangi polusi plastik, dan mencegah praktik perikanan yang berbahaya.

15. Ekosistem Daratan

Mengutamakan pengelolaan hutan, pelestarian keanekaragaman hayati, dan pemulihan lahan yang terdegradasi. Fokus SDG ini adalah untuk melindungi ekosistem daratan dan pengendalian invasi spesies asing.

16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Untuk mendorong perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat, mereka berusaha mengurangi kekerasan, mempromosikan akses yang sama ke sistem hukum dan mengurangi korupsi.

17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Memiliki tujuan untuk meningkatkan kerja sama internasional dalam pencapaian SDGs. Fokusnya terletak di peningkatan kapasitas, transfer teknologi, serta mendukung keuangan untuk memastikan upaya pembangunan akan berlangsung.³⁹

³⁹ Universitas Tarumanagara, 2023, “Kenal Lebih Jauh 17 Tujuan SDDs”, <https://untar.ac.id/2023/12/15/kenal-lebih-jauh-17-tujuan-sdgs/>, Di akses tanggal 27 Desember 2024.

Gambar 2.5 *The Sustainable Development Goals (SDGS)*



Sumber: *United Nation*, 2015

Untuk membuatnya lebih mudah dilaksanakan, 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dibagi menjadi empat pilar, yaitu:

1. Pilar Pembangunan sosial dengan 5 tujuan dasar, yaitu:
 - a. Menyelesaikan kemiskinan.
 - b. Menghilangkan rasa lapar.
 - c. Membangun gaya hidup yang sejahtera dan sehat.
 - d. Memastikan kualitas pendidikan inklusif.
 - e. Memperoleh kesetaraan gender.
2. Pilar Pembangunan Ekonomi mencakup lima tujuan dasar, seperti:
 - a. Memastikan akses energi,
 - b. Meningkatkan inklusi dan pertumbuhan ekonomi,
 - c. Menciptakan infrastruktur yang kuat,

- d. Mengurangi kesenjangan nasional dan internasional,
 - e. Bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan.
3. Pilar Pembangunan Lingkungan dengan enam tujuan, misalnya:
- a. Penyediaan air bersih dan sanitasi layak,
 - b. Pemukiman berkelanjutan dan pembangunan kota,
 - c. Produksi dan konsumsi yang berkelanjutan,
 - d. Mengatasi perubahan iklim,
 - e. Ekosistem di sekitar lautan,
 - f. Ekosistem daratan.
4. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola untuk menyebarkan arus ekonomi sosial dan lingkungan melalui penegakkan “*Good Governance*”.⁴⁰

2.6. Kerangka Konseptual

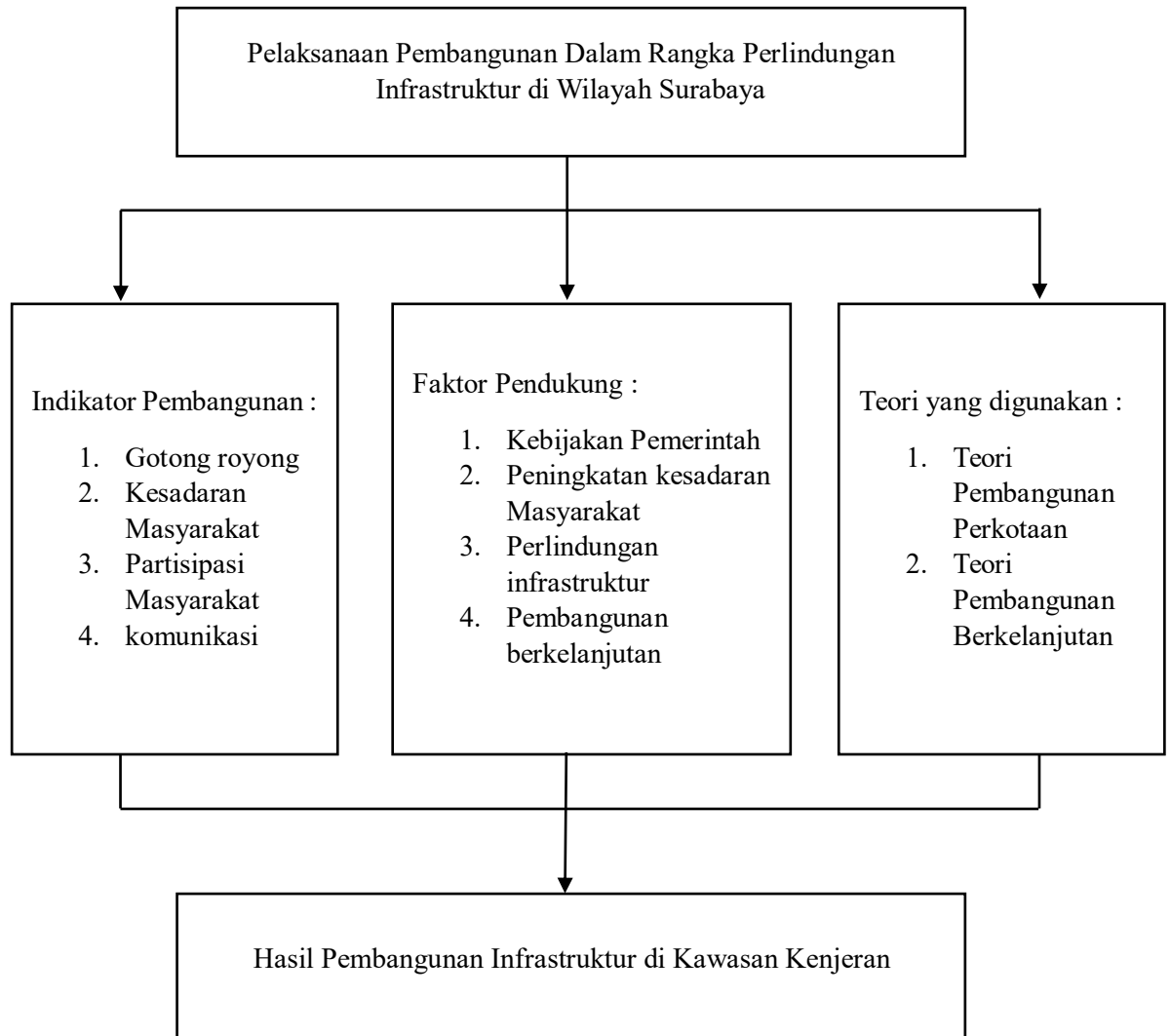
Kerangka konseptual merupakan kerangka berpikir yang menggambarkan hubungan antar konsep dalam suatu penelitian. Kerangka konseptual juga memiliki fungsi seperti:

- a. Mendefinisikan variabel dalam penelitian.
- b. Memetakan hubungan antar variabel penelitian.
- c. Menjelaskan makna kata-kata dalam kajian teori.
- d. Membantu penelitian untuk merancang dan menjelaskan hubungan antar konsep.
- e. Memudahkan peneliti dalam menganalisis dan menginterpretasikan data.

⁴⁰ Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Nasional, 2023, “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”, Universitas Gajah Mada, <https://psppr.ugm.ac.id/2023/03/17/tujuan-pembangunan-berkelanjutan/>. Di akses tanggal 27 Desember 2024.

Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, pembangunan harus dilakukan dalam pemeliharaan infrastruktur. Pembangunan bergantung pada koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menangani masalah yang sudah ditetapkan. Serta kesadaran dan partisipasi masyarakat yang terlibat. Gambaran kerangka konseptual menjelaskan tentang pembangunan dalam rangka perlindungan infrastruktur di wilayah Surabaya.

Gambar 2.6 Kerangka Konseptual



Sumber: Data Peneliti, 2025